

MEMBANGUN MASYARAKAT KOTA MENUJU MASYARAKAT MADANI

Sri Sedar Marhaeni (email: Srisedar1956@gmail.com)
Program Studi PPKn FKIP Universitas PGRI Banyuwangi

ABSTRAK

Warga kota bekerja dimana saja, tak terbatas oleh ruang. Mereka bisa berdagang dengan antar bangsa di dunia, seperti di bidang ekspor import, perbelanjaan dan transportasi. Di samping di bidang kegiatan ekonomi juga di bidang sosial dan budaya yang lain, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, diplomasi, rekreasi dan lain-lain.. Sebagai lingkungan pemukiman warga yang sangat heterogen dan kompleks, kota menghadapi seribu satu masalah yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah selaku pengelola wilayah kota, maupun anggota masyarakat yang bersangkutan sendiri. Problema tersebut beraneka, seperti masalah lahan atau fisik perumahan, maupun masalah sosial dan budaya yang saling berkait satu sama lain.

Dalam memasuki milenium III, tuntutan masyarakat madani di dalam negeri menjadi semakin besar. Masyarakat madani yang mereka harapkan adalah masyarakat yang lebih terbuka, pluralistik, dan desentralistik dengan partisipasi politik yang lebih besar, jujur, adil, mandiri, harmonis, memihak yang lemah, menjamin kebebasan beragama, berbicara, berserikat dan berekspresi, menjamin hak kepemilikan, dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Membangun masyarakat kota menuju masyarakat madani dapat ditempuh melalui langkah-langkah perbaikan di sektor ekonomi, menumbuhkan intelektualitas, meningkatkan partisipasi aktif, menumbuhkan budaya modern, mengembangkan pluralisme, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di kalangan warga masyarakat kota.

Kata kunci: *membangun, masyarakat kota, menuju masyarakat madani*

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai sistem sosial yang menyeluruh setidaknya-tidaknya harus memiliki komponen dasar yang membentuk kesatuan, yaitu kebudayaan sebagai sistem nilai kolektif, struktur sosial sebagai institusi yang memwadahi interaksi sosial secara terpola, sistem kepribadian yang berwujud identitas atau ciri-ciri yang melekat dalam mentalitas para anggotanya, lingkungan, dan faktor fisik yang menjadi penopang kehidupannya. Dengan demikian,

masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang kompleks dari kehidupan manusia.

Masyarakat kota mempunyai kriteria dan menghasilkan karakter tertentu bagi penduduknya. Terciptalah suatu masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sosial budaya yang berbeda dengan masyarakat diluarnya. Dari segi fisik habitat dan jenis pekerjaan pokok penduduknya, mempengaruhi tata cara pergaulan dan budaya yang dikembangkan oleh warga kota yang sangat heterogen. Penduduk kota cepat

bertambahnya karena di samping pertumbuhan alami, juga adanya migrasi, baik urbanisasi atau migran dari negara atau kota-kota lain.

Kepadatan penduduk kota yang begitu tinggi, mengakibatkan warga kota dekat secara fisik tapi jauh dari segi sosial-psikologis, seolah-olah terjadi “jarak sosial” yang cukup dalam. Terjadi perbedaan-perbedaan, yang sering kali, sangat jauh tentang penilaian sosial (social-value) karena adanya perbedaan status, kepentingan dan situasi serta kondisi kehidupan kota yang mungkin berbeda dari segi latar belakang pendidikan dan falsafah hidup dan agama yang dianut. Adanya heterogenitas penduduk kota menghasilkan juga sejumlah besar kontradiksi yang sangat bervariasi.

Kontradiksi tersebut semakin diperparah oleh melemahnya kontrol negara sebagai penegak hukum dan keadilan masyarakat. Hilangnya keberpihakan negara pada nilai-nilai keadilan dan pudarnya ketaatan pada hukum menjadi salah satu persoalan serius yang mengancam keberlangsungan demokrasi di negeri ini. Kuatnya hegemoni partai politik atau anggota parlemen semakin mendistorsi makna anggota parlemen sebagai wakil rakyat. Kepentingan politik partai seringkali mengalahkan kepentingan masyarakat yang diwakili anggota parlemen tersebut. Kesadaran masyarakat untuk memilih wakil rakyat secara rasional berdasarkan aspirasi dan kepentingan mereka juga masih rendah.

Fenomena gerakan separatisme dan radikalisme di Indonesia yang menggejala dan semakin marak. Banyaknya faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa seperti faktor ekonomi, politik, keamanan, agama

maupun budaya. Keberagaman dalam satu bangsa (Bhineka Tunggal Ika) seakan mulai terkikis. Solidaritas kebangsaan seakan tersumbat oleh berbagai keterbatasan dan kentalnya kepentingan. Hal tersebut menyebabkan timbulnya keraguan disebagian masyarakat akan keberadaan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk reorientasi nation building untuk kembali merekatkan ikatan-ikatan kebangsaan yang beragam menjadi satu bangsa utamanya di masyarakat perkotaan (Asyari Ibm. Chamim; 2003 : xxx).

Proses reformasi yang dirasa masih belum sesuai dengan harapan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk segera mewujudkan tatanan masyarakat yang madani. Namun demikian, mewujudkan masyarakat madani tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Membentuk masyarakat madani memerlukan proses dan waktu yang panjang, serta menuntut komitmen masing-masing warga bangsa ini untuk mereformasikan diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih.

Masyarakat madani merupakan konsep yang kompleks, karena didalamnya terkandung konsep relasi-relasi sosial yang beradab yang hendak ditransformasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Didalamnya terdapat konsep masyarakat, hukum, demokrasi, pemerintahan dan kenegaraan, keterbukaan, perubahan sosial, kebudayaan, dan lain-lain dalam relasi-relasi dan struktur sosial. Kompleksitas konsep masyarakat madani ini perlu ditransformasikan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis ajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dan bagaimana masyarakat kota.
2. Apa dan bagaimana masyarakat madani.
3. Bagaimana membangun masyarakat kota menuju masyarakat madani.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penulisan yang penulis gunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode *library research*. yang mana penulis menggunakan buku-buku dari perpustakaan sebagai bahan referensi dimana penulis mencari literatur yang sesuai dengan materi dan juga bersumber pada kajian empirik dari penelitian yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Kota

Shadily (1993:50) mengatakan bahwa masyarakat dapat didefinisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Menurut Ralph Linton bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Bermasyarakat bagi manusia adalah sangat penting, manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri secara berkelanjutan dan manusia baru dapat disebut sebagai manusia yang sempurna apabila ia ternyata dapat hidup bersama dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam hal ini Adham Nasution (1983)

menjelaskan bahwa hidup bermasyarakat adalah mutlak bagi manusia supaya ia dapat menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni sebagai human being, orang atau oknum, yang mampu bermasyarakat dan berkebudayaan. (Abdul Syani, 1994:30-33)

Penduduk kota ialah semua yang mendiami atau yang bermukim di suatu kota. Mereka ini sangat bervariasi baik dari segi etnis, lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan serta latar belakang agama dan kebudayaan yang dianutnya. Sehingga masyarakat kota mempunyai ciri khas yang secara umum berbeda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat kota sangat heterogen dalam berbagai segi. (Imam SA, 1993:60)

Masyarakat kota adalah seluruh manusia yang mendiami / hidup bersama di suatu tempat (kota) pada suatu waktu, yang mana didalamnya terdapat kelompok-kelompok, dan golongan-golongan lainnya yang dinamakan keluarga, kelas, mungkin juga kasta, dimana terdapat aksi reaksi dan kesadaran akan adanya anggota-anggota lain yang menyebabkan orang-orang itu berhati-hati terhadap kepentingan-kepentingan sesamanya di dalam kelompok itu masing-masing dan terhadap masyarakat luas. (Shadily, 1993:61)

Dari segi status penduduk kota, ada yang menetap sementara, sebagai penduduk tetap atau penduduk musiman. Banyak pendatang yang selalu silih berganti, karena penduduk kota jauh lebih mobil dari pada penduduk desa. Pertambahan penduduk kota dapat bergerak sangat cepat, karena banyaknya pendatang baru tersebut. Oleh karena itu membicarakan kota tak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai urbanisasi

dalam pembicaraan masyarakat kota pada umumnya. (Imam SA, 1993:61)

Ada beberapa karakteristik kota, menurut Thalla, 1972 dalam Sapari Imam Asyari, 1993 :

- a. Dari aspek morfologi, terdapat bentuk fisik yang berbeda seperti cara membangun bangunan tempat tinggal yang berjejal dan mencakar langit (tinggi) dan serba kokoh.
- b. Dari aspek jumlah penduduk, kepadatan penduduknya dalam suatu wilayah relatif lebih banyak / padat.
- c. Dari aspek sosial, gejala kota dapat dilihat dari hubungan-hubungan sosial diantara penduduk atau warga kota bersifat kosmopolitan. Hubungan sosialnya bersifat impersonal, sepiantas lalu (superfisial, terkotak-kotak, karena kepentingan, dll).
- d. Dari aspek ekonomi, cara hidup warga kota bukan di bidang pertanian sebagai mata pencaharian pokok, tetapi di bidang lain seperti segi produksi atau jasa (Thalla, 1972, th1) dalam Imam SA, 1993:21-23).

Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota menurut Soerjono Soekanto (1990: 170-171) sebagai berikut: a)Kehidupan keagamaannya berkurang. b)Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri, c)Pembagian kerja diantara warga kota lebih tegas dan punya batas-batas nyata, d)Kemungkinan dapatkan pekerjaan, lebih banyak diperoleh warga kota, e)Jalan pikiran rasional pada umumnya dianut oleh masyarakat perkotaan, f)Jalan kehidupan lebih cepat diraih di kota, g)Perubahan sosial tampak dengan nyata di kota.

Fungsi kota menurut M. Thalla : 1972 dalam Imam SA (1993:29): a)Kota sebagai pusat produksi, b)Kota sebagai pusat perdagangan dan niaga, c)Kota sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibu kota, d)Kota sebagai pusat kebudayaan, e)Kota sebagai pusat pengobatan dan rekreasi, f)Kota yang berfungsi ganda atau beraneka ragam.

Pranata Kota (kelembagaan kota), sebanyak dan sekelompok kehidupan yang ada di masyarakat kota, yang berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, adapun macam-macam kelembagaan yang ada di masyarakat kota, antara lain : 1) Keluarga; 2) Pendidikan dan sekolah; 3) Pemerintahan dan politik; 4) Organisasi ekonomi; 5) Keagamaan; 6) Keluarga. (Imam, SA; 1993:69-87).

Sebagai lingkungan pemukiman yang warganya yang sangat heterogen dan kompleks, kota menghadapi seribu satu masalah yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah selaku pengelola wilayah kota, maupun anggota masyarakat yang bersangkutan sendiri. Problema tersebut beraneka, seperti masalah lahan atau fisik perumahan, maupun masalah sosial dan budaya yang saling berkait satu sama lain.

Masalah-masalah atau problem kota menurut Imam, SA (1993:88) antara lain :

- 1) Masalah pertumbuhan jumlah penduduk, baik karena pertambahan alami karena migrasi termasuk urbanisasi. Masalah ini berkaitan erat dengan masalah lain, seperti penyediaan tempat pemukiman (perumahan), lahan, tempat pekerjaan, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, pembuangan limbah, sampah,

sarana hiburan, keindahan kota, angkutan dan masih banyak lagi lainnya.

- 2) Masalah industrialisasi akan membawa serta permasalahan yang lain, seperti penyediaan lahan yang tepat untuk wilayah industri agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan pemukiman penduduk, pembuangan limbah industri, termasuk kemungkinan terjadinya berbagai pencemaran kepada lingkungan hidup, baik air, udara atau pencemaran fisik lainnya, juga masalah sosial karena industri mesti mengundang tenaga kerja dengan segala konsekuensinya.
- 3) Masalah pengaturan ketertiban dan keamanan masyarakat, pengaturan jaringan lalu lintas, transportasi, komunikasi, penyediaan penerangan umum, masalah gelandangan, kemiskinan diperkotaan pelacuran dan berbagai hal untuk pelayanan masyarakat.
- 4) Masalah upaya pemekaran kota atau penataan kembali fisik kota, sering terjadi penggusuran rumah dan tanah milik penduduk dengan berbagai problema yang mengikutinya. (Slamet Riyadi, 1984:tp.hal. dan Rahardjo, 1983:23-25)

Demikianlah gambaran problema yang silih berganti dan saling terkait satu dengan yang lain yang dihadapi oleh pemerintah kota maupun semua warga kota, yang tak pernah berhenti sepanjang waktu.

Masyarakat Madani

Syed Muhammad Naquib Al-Attas mengatakan bahwa konsep masyarakat madani berasal dari kosa kata bahasa Arab yang berarti, *pertama*, “masyarakat kota” dan *kedua*, “masyarakat yang

berperadaban”, sehingga masyarakat madani sama dengan *civil society*, yaitu masyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai peradaban. (Asykuri, Ibn Chamim, dkk; 2003;48).

Menurut pendapat Hall (1998) pengertian masyarakat madani identik dengan *civil society*, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjewantahkan ke dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Hefner (1998:16-20) menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi.

Lebih lanjut menurut Profesor Ryaas Rasyid dalam diskusi dengan harian Kompas (1997), konsep masyarakat madani lahir pasca revolusi industri di Eropa Barat, yakni ketika kondisi ekonomi masyarakat sudah semakin baik dan mampu membayar pajak. Masyarakat sadar, sumbangsih mereka bagi pendapatan negara semakin penting sehingga mereka menuntut hak-haknya, sehingga muncul jargon politik : tidak ada pajak tanpa suara. Dalam kondisi demikian, masyarakat menghendaki adanya semacam kekuatan tawar-menawar (*bargain*) yang seimbang terhadap negara.

Di Indonesia, perjuangan masyarakat madani dimulai pada awal pergerakan kebangsaan, dipelopori oleh Syarikat Islam (1912), dan dilanjutkan oleh Soeltan Syahrir pada awal kemerdekaan (Norlholt, 1999). Jika demokrasi Soeltan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif, baik dari rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru. Tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat madani pada era

reformasi ini tampaknya sudah menjadi suatu kebutuhan.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, memiliki perbandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. (Srijanti, dkk; 2009; 198).

Masyarakat madani timbul karena faktor-faktor :

- a. Adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi (menguasai) masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasa. Tidak adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. karena adanya monopoli.
- b. Masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik (bodoh) dibandingkan dengan penguasa (pemerintah). Warga negara tidak memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Sementara, demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
- c. Adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat,

karena pada ruang publik yang bebaslah individu berada dalam posisi yang setara dan akan mampu melakukan transaksi-transaksi politik tanpa ada kekhawatiran. (Srijanti, dkk;2009:199).

Adanya tiga karakteristik dasar dalam masyarakat madani, yaitu :

1. Diakuinya semangat pluralisme, artinya pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (*given*) dalam kehidupan. Pluralitas bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan.
2. Tingginya sikap toleransi baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain.
3. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekadar kebebasan dan persaingan, demokrasi adalah pula suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. (Srijanti, dkk; 2009:202).

Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas

dalam proses membuat keputusan dan menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik dan lembaga masyarakat. (Srijanti, dkk; 2009:203).

Mengingat struktur sosial ekonomi yang semakin beragam, karakteristik masyarakat madani Indonesia adalah perpaduan yang serasi diantaranya kedua konsep yaitu konsep *al madinah al fadhilah* (Al Farabi) dan konsep *civil society* yang berkembang dalam negara-negara industri. Namun sekali lagi, konsep *civil society* diterapkan pada masyarakat Indonesia modern harus diadaptasikan dengan karakteristik masyarakatnya yang bersifat sosialis-religius. Masyarakat Indonesia modern itu memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. **Iman dan takwa**, artinya masyarakat sipil yang diinginkan masyarakat yang etis religius, yang lebih mengetengahkan akhlak dan kebijakan manusia sebagai makhluk Tuhan.
- b. **Demokratis**, adalah masyarakat yang memiliki kesadaran berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan bangsa ke arah terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. **Kemandirian**, ialah kesiapan masyarakat menghadapi tantangan masa depan, persaingan global, peningkatan nilai tambah dan transformasi menuju masyarakat modern.
- d. **Keunggulan**, nilai ini berwujud mentalitas manusia dalam masyarakat yang menilai tinggi terhadap hasil karyanya dan dorongan untuk menghasilkan suatu karya adalah kepuasan untuk mencapai karya itu sendiri.

- e. **Profesional**, adalah masyarakat yang memiliki hasrat untuk melakukan eksplorasi lingkungan dan sumber-sumber kekuatan alam, yang akan menjadikan manusia mampu melakukan inovasi, perubahan dan penyempurnaan.
- f. **Supremasi hukum** (*rule of law*), yaitu seluruh kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang tidak dikendalikan oleh suatu sistem kekuatan tetapi berlandaskan pada hukum dan aturan yang disepakati bersama. (Furqon dan Dasin Budimansyah ; 2009).

Membangun Masyarakat Kota menuju Masyarakat Madani

Kondisi masyarakat kota yang dilanda semangat demokrasi dan otonomi daerah, serta derasnya globalisasi membutuhkan kemauan dan kemampuan hidup bersama dalam sikap saling menghargai, toleransi, dalam kemajemukan yang tidak saling mengeksklusifkan terhadap berbagai suku, agama, bahasa dan adat yang berbeda. Kepedulian, kesantunan, dan setia kawan merupakan sikap yang sekaligus menjadi prasarana yang diperlukan oleh masyarakat kota.

Untuk membangun masyarakat kota menuju masyarakat yang madani, diperlukan implementasi terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

1. Perbaikan Kegiatan Perekonomian untuk masyarakat.

Perbaikan ekonomi dilakukan dengan memberdayakan potensi dan kemampuan masyarakat untuk memberi dan menciptakan lapangan pekerjaan, maka beberapa program yang dapat dijalankan, yaitu: a) mendorong masyarakat membuat kegiatan ekonomi produktif yang

berbasis sumber daya lokal, b) mengembangkan usaha dalam bentuk kelompok atau koperasi, c) membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai inkubator bisnis bagi UKM, d) memberikan semangat motivasi untuk berusaha secara ulet, tekun, jujur dan hemat, tidak berputus asa, e) mengembangkan semangat cinta produksi dalam negeri, f) mendidik UKM untuk taat pada peraturan perundangan, g) melatih kemandirian dalam berusaha, h) mendorong pemerintah membuat kebijakan tentang penembangan usaha kecil dan menengah, i) mendorong pemerintah memberikan kebijakan pengalokasian kredit modal pada usaha kecil dan menengah.

2. Membangun Intelektualitas yang Berkomitmen dan Independen.

Untuk membangun masyarakat kota yang intelek dan berkomitmen serta independen, maka perlu dilakukan sebagai berikut : a) membangun masyarakat ilmiah berpikir kritis, dan menjauhkan doktrinisasi, b) meningkatkan mutu pendidikan seperti wajib belajar, dan meningkatkan anggaran pendidikan sampai 20% dari APBN, dan peningkatan peran serta masyarakat, c) mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis, d) mengembangkan organisasi, sebagai wadah untuk berinteraksi sosial, serta mengembangkan sikap yang independen, e) mengembangkan sikap mental yang bertanggung jawab di masyarakat.

3. Membangun Masyarakat Kota yang Berbudaya Modern.

Membangun masyarakat kota membutuhkan transformasi budaya, baik menyangkut teknologi dan aspek

organisasi, untuk membangun masyarakat kota yang modern, adalah : a) cara berpikir yang ilmiah yang melembaga dalam sistem pemerintahan dan masyarakat, b) sistem administrasi yang baik, tata pamong atau tata kelola (good governance) yang bersifat transparan, dapat dikelola (manageable), akuntabel, c) sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dengan membangun sistem informasi, d) penciptaan iklim yang menyenangkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penggunaan alat-alat komunikasi massa, e) tingkat organisasi yang tinggi yang dicirikan dengan disiplin, jujur, dan tepat waktu.

4. Membangun Pluralisme yang Beragam.

Walaupun berbeda-beda, kita dapat mengembangkan kerja sama yang baik dan harmonis, karena Indonesia menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam rangka membangun pluralisme, maka beberapa hal perlu dilakukan, yaitu: a) meningkatkan rasa hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan, b) meningkatkan hubungan antar pemeluk agama untuk tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada pemeluk agama lain, c) mengembangkan sikap saling mencintai dan mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sebagai manusia Indonesia, d) mengembangkan pergaulan antar suku, antara agama, antar daerah, sehingga terbangun rasa saling mencintai dan memiliki, e) mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama, f) menjalankan hidup dengan sederhana,

tidak boros, dan tidak gaya hidup mewah.

5. **Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat**

Perlu dilakukan langkah-langkah mendorong peran aktif masyarakat kota untuk memberikan pengawasan kepada pemerintah agar lebih bersih, antara lain: a) penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan rakyat bagi penyalur aspirasi dari yang diwakilinya, b) membangun kemandirian lembaga peradilan dan intervensi pemerintah dan pihak lain, c) membangun aparatur negara yang professional yang penuh integritas, d) membangun peran serta masyarakat yang kuat dan mandiri, serta bermoral, e) penguatan otonomi daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan antar daerah, f) membangun keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan.

6. **Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa**

Untuk membentuk masyarakat madani yang beriman dan bertaqwa, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: a) memberikan pendidikan agama sejak dini, dan mewajibkan lembaga pendidikan memberikan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianut siswa, b) mengimplementasikan ajaran agama sejak dini dalam kehidupan dan menjadikan landasan moral dalam kegiatan bermasyarakat, c) memberikan kebebasan berekspresi bagi masyarakat sesuai dengan agamanya, tanpa menimbulkan gangguan terhadap masyarakat lain, d) menyediakan fasilitas untuk beribadah yang layak bagi umat beragama.

Kedepan, semangat membangun masyarakat madani sebagai modal masyarakat yang demokratis yang religius dan berkeadaban, di lingkungan masyarakat kota sebagai kualitas masyarakat ideal masa depan di Indonesia. (Srijanti, dkk ; 2009:206-212).

KESIMPULAN

Masyarakat kota adalah seluruh manusia yang mendiami atau bermukim di suatu kota, yang didalamnya terdapat kelompok etnis, agama, lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, kebudayaan, yang mana terdapat aksi, reaksi dan kesadaran yang berbeda untuk melaksanakan kehidupannya.

Adapun ciri masyarakat kota antara lain : ada spesialisasi pekerjaan, mata pencaharian penduduk beragam penduduknya padat, warganya mobilitasnya tinggi, sifat warganya heterogen, kompleks, impersonal, eksternal, tetapi kehidupan keagamaannya kurang. Fungsi kota, sebagai pusat perdagangan, pemerintahan, kebudayaan, pengobatan, rekreasi dan beraneka fungsi lainnya, bagi lingkungan kawasan lain disekitarnya.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat kota antara lain : pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, perkembangan teknologi dan industrialisasi yang dapat membawa serta permasalahan lainnya seperti lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, keluarga, pengaturan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemekaran dan penataan kembali fisik kota dan lain-lainnya.

Masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan,

toleransi berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten mampu berkoordinasi, sinkron, integral, mengakui emansipasi, hak asasi, pluralis dan lain-lainnya.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun measyarakat kota menuju masyarakat madani adalah melalui perbaikan sektor ekonomi, menumbuhkan intelektualitas, meningkatkan partisipasi aktif, menumbuhkan budaya modern, mengembangkan pluralitas serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di kalangan warga masyarakat kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Asykuri Ibu Chamim, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan, (Civic Education) menuju kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*, LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bintarto, R, 1983; *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Furqon, Dasin Budimansyah, 2009, *Perubahan menuju Masyarakat Indonesia Baru, Menengok Kembali Peran Perguruan Tinggi*, Poliex dalam Pertemuan Pimpinan Pascasarjana se Indonesia, Universitas Malawarman Samarinda tanggal 4-6 Agustus 2009.
- Imam Sapari Asyari, 1993; *Sosiologi, Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Raharjo, 1983; *Perkembangan Kota dan Permasalahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Shadily Hassan, 1993, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Slamet Riyadi; A.L, 1984; *Tata Kota, Suatu Pendekatan dari Aspek Kesehatan Lingkungan*, Bina Indra Karya, Surabaya.
- Srijanti, A. Rahman H.I, Purwanto SK, 2009; *Pendidikan Keorganegaraan, untuk Mahasiswa*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Suekanto Soerjono, 1995; *Sosiologi, suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Syani Abdul, 1987; *Sosiologi kelompok dan masalah sosial*, Fajar Agung, Jakarta.
- Syani Abdul, 1994; *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan Aksara*, Jakarta.
- Thalla, M, 1972, *Kuliah Sosiologi Kota*, Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin.